



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan
**dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang penanggulangan bencana pada tahun 2023. Penyusunan Renja bertujuan agar seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen untuk perbaikan Renja tahun yang akan datang. Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, Januari 2023
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Arfan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II.....	6
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sulteng.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program.....	25
BAB III.....	26
TUJUAN DAN SASARAN.....	26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Prov. Sulteng.....	26
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	27
BAB IV.....	37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	37
BAB V.....	38
PENUTUP.....	38
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	38
5.2 Rencana tindak lanjut.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1.....	7
Tabel 2 2.....	19
Tabel 3 1.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

RENJA 2023

pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 20) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008;
 - 21) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 22) Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022;
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

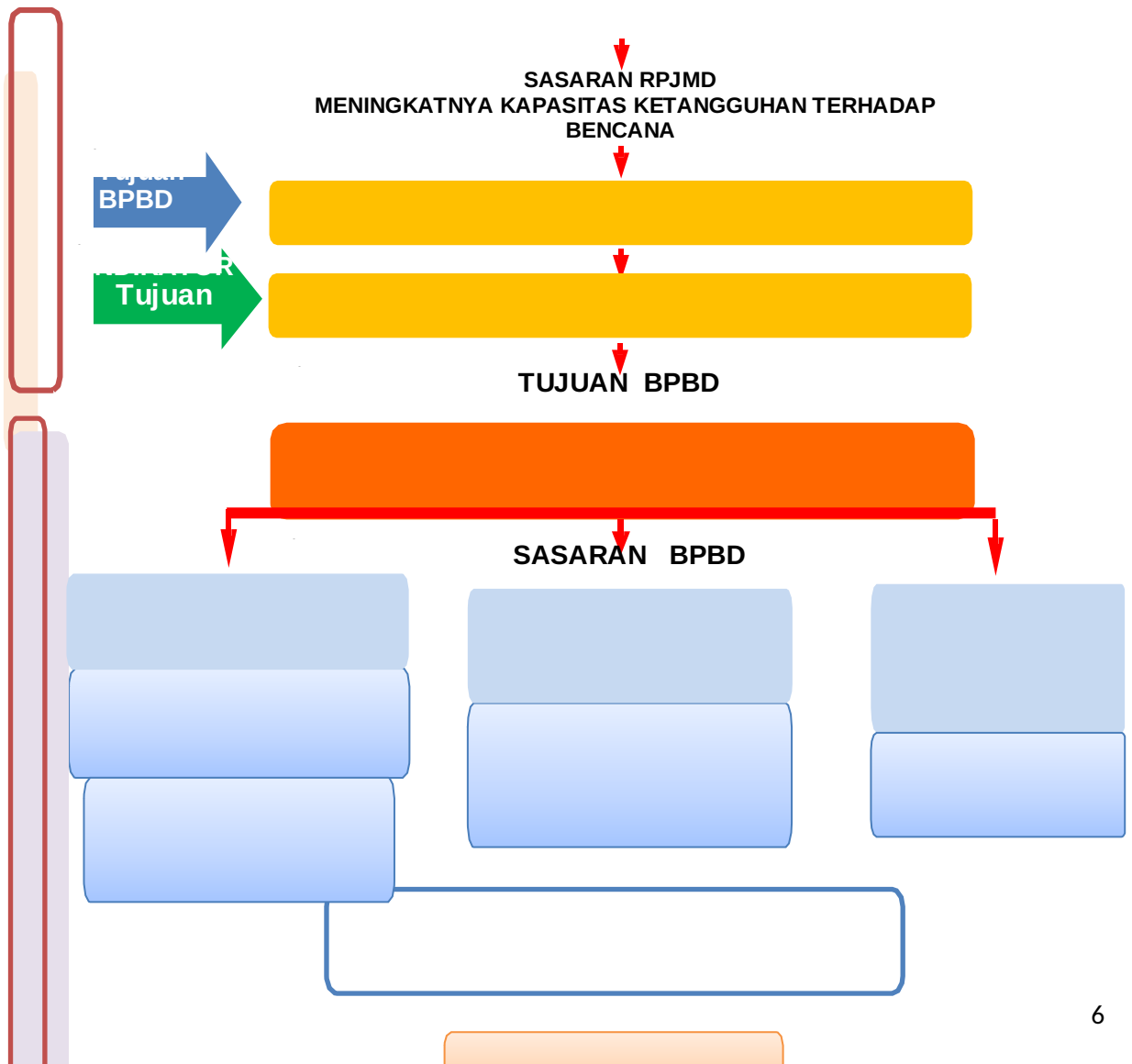
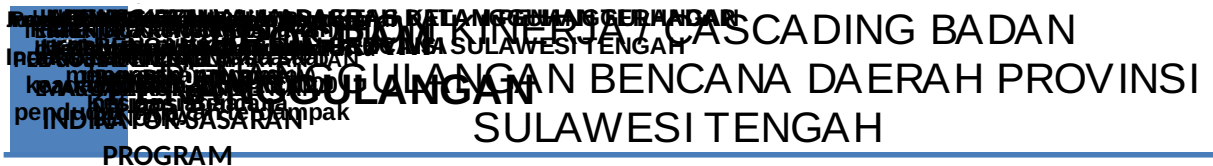
Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022 – 2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2026.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi :

1. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha Pengurangan risiko dan mitigasi serta penanganan kedaruratan bencana;
4. Membangun sistem informasi penanggulangan bencana di daerah-daerah kabupaten/kota yang rawan bencana;
5. Pembentukan wilayah-wilayah penanganan bencana dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai bagi Kabupaten/Kota.

1.4 CASCADING



RENJA 2023

KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI	• INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Mitigasi Struktural dan Non Struktural
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Penyusunan Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	• Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Propinsi dan Kabupaten / Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	• Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	• Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana	• Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	• Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

RENJA 2023

KEGIATAN :
PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI

• INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan yang tertangani

SUB KEGIATAN :

• INDIKATOR SUB KEGIATAN :

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

• Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana

Penyusunan Rencana Kontinjensi

• Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

• Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan

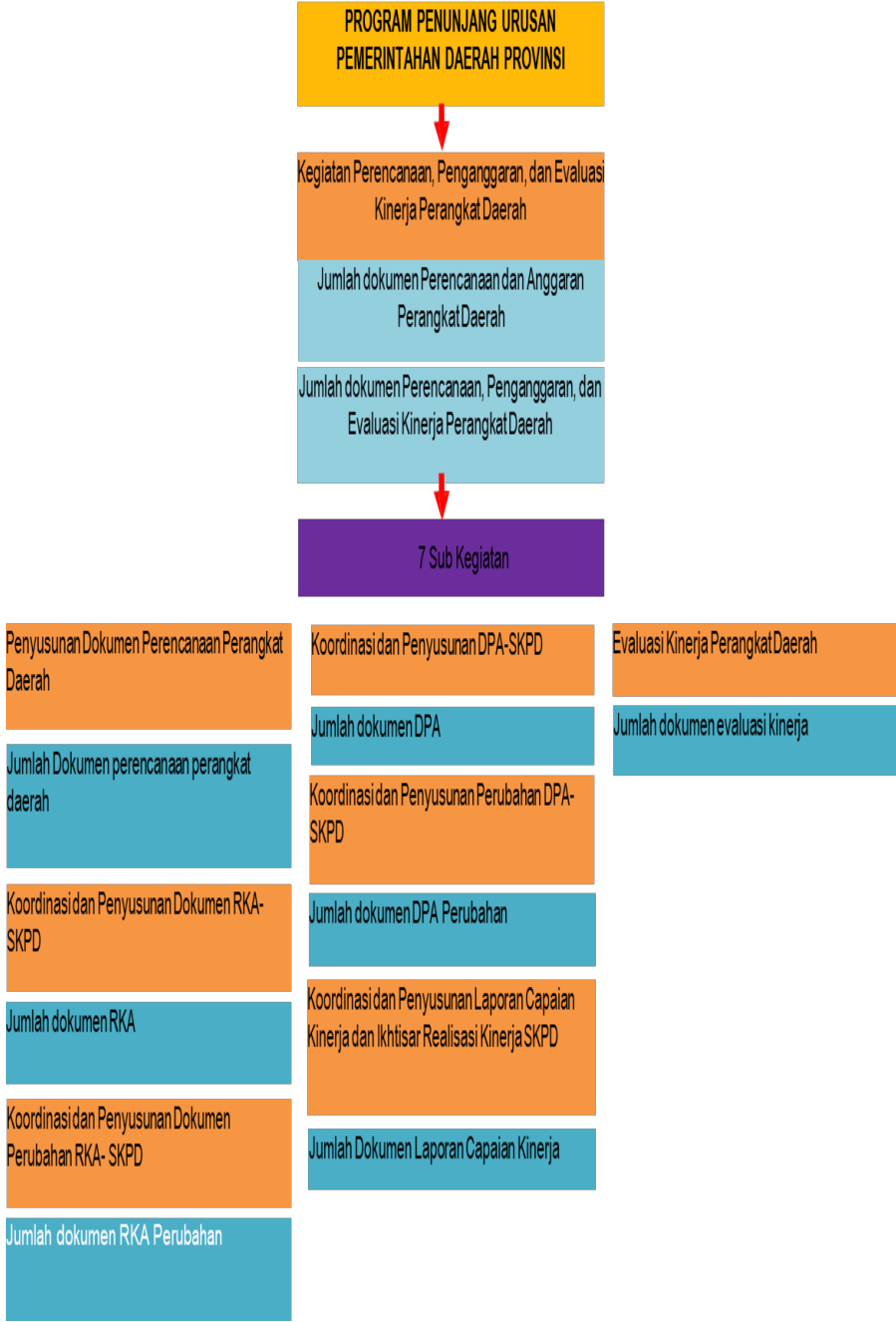
RENJA 2023

KEGIATAN : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	• INDIKATOR KEGIATAN : Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	• Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	• jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit

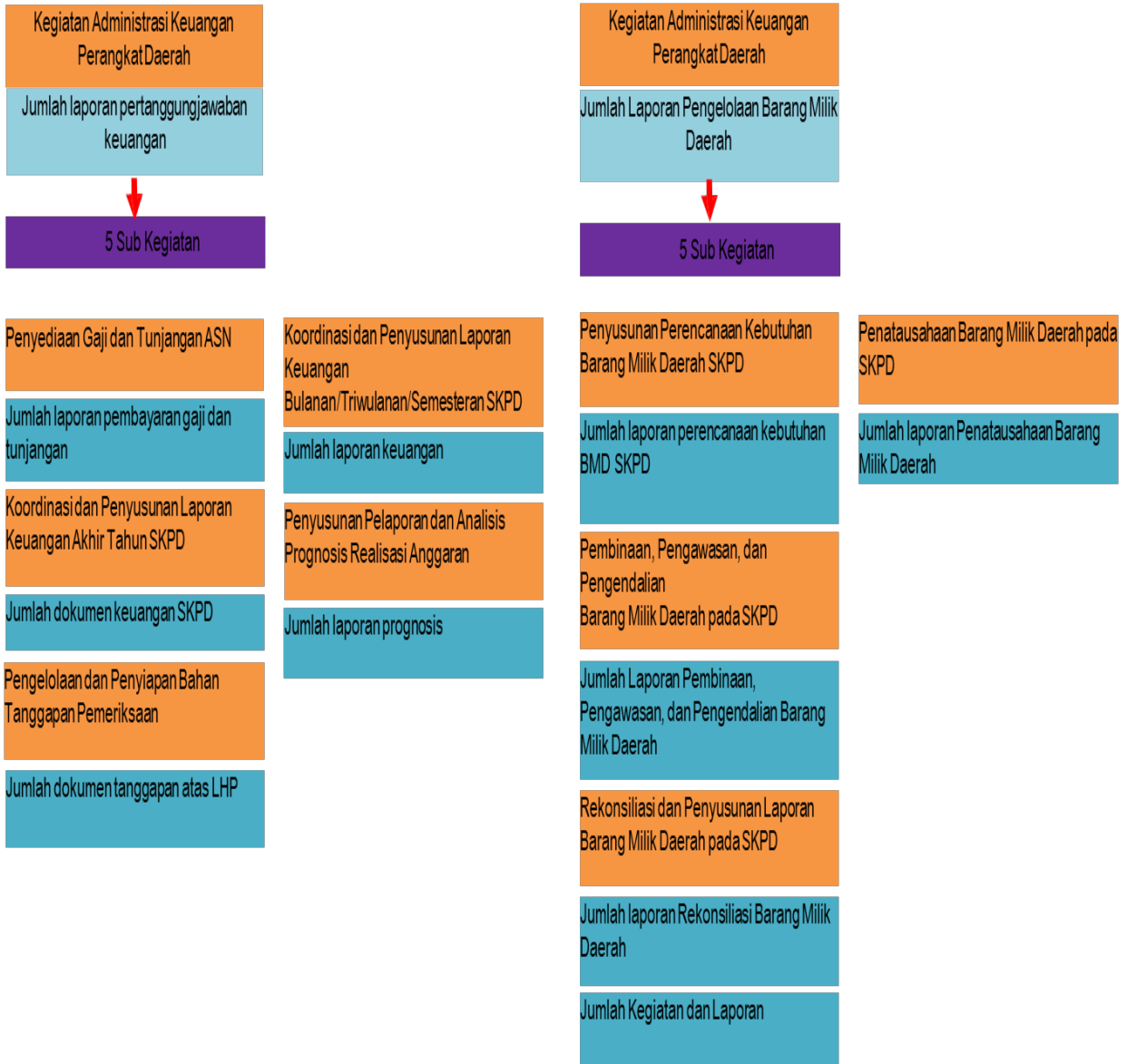
RENJA 2023

KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	• INDIKATOR KEGIATAN : Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Penyusunan Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	• Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	• Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	• Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	• Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	• Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

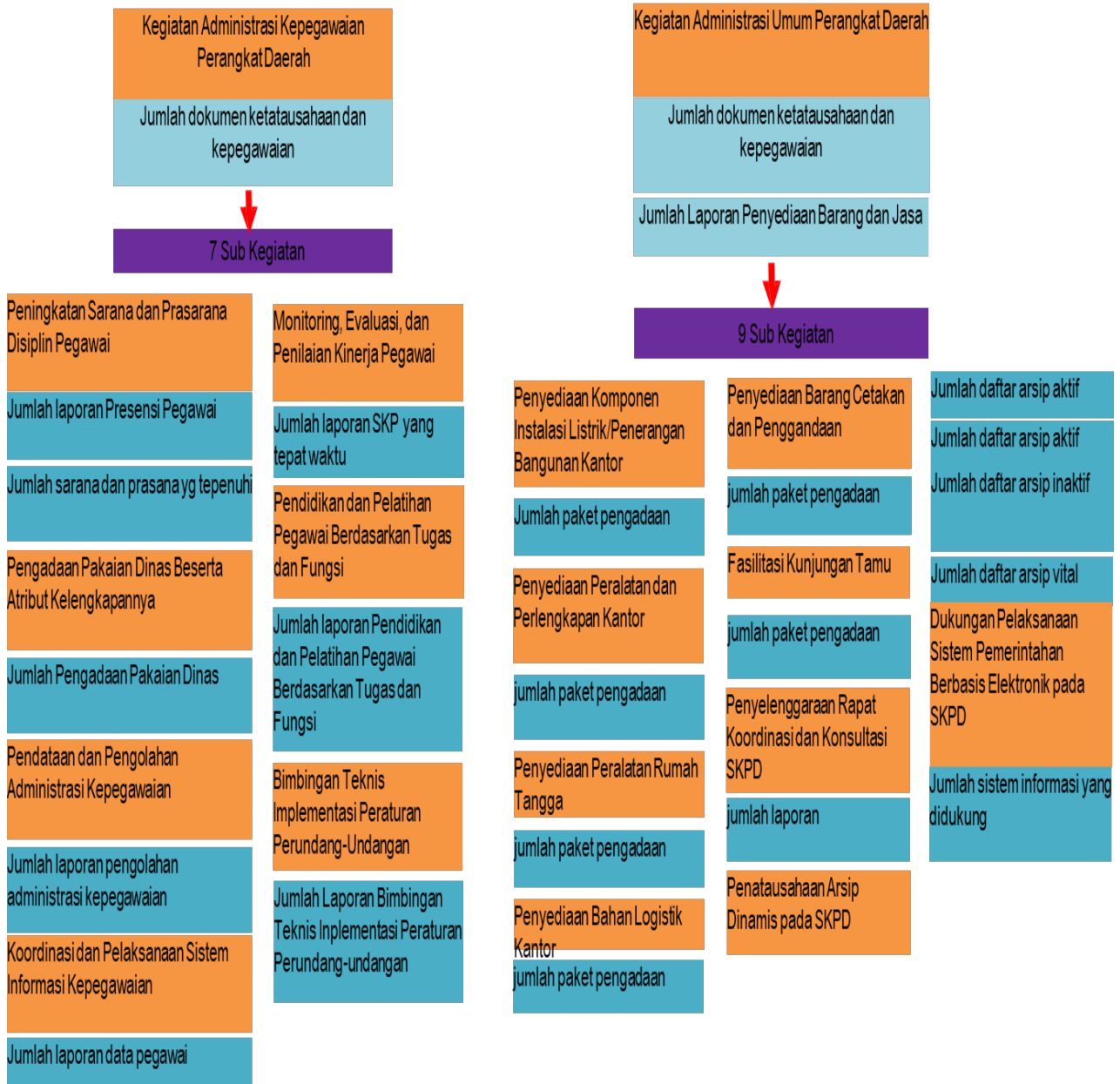
RENJA 2023



RENJA 2023



RENJA 2023



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Cascading
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi,
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
				Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Reallisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2023)	Capaian dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis BPBD Prov Sulteng	%	60	100	100	100			
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2			100	2	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	3	1	1	100	3	-	-

RENJA 2023

	SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA[1]SKP								
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1				1		
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dukungan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%			100		-	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	1	58	5	100	58	-	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Org/bln		58			1		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5			5		
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2			2		
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah pada OPD		%	100					
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	2	2	100	2	-	-
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan rapat-rapat		%	100					

RENJA 2023

		koordinasi/konsultasi OPD								
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pket		1			1		
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1			1		
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1			1		
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota		4			13		
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Administrasi Umum	%		100		100	-	-	
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		3	1		3		
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Layanan Administrasi Umum	%		100	1	100	-	-	
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	bulan		12	75	100	12	-	-

RENJA 2023

	dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		1	100	1	-	-
13.	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket		1	100	1	-	-
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	%		100	100		-	-
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14	100	14	-	-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tercapainya Penanganan bencana di provinsi Sulawesi Tengah	Kab/Kota						
h.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tingkat Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Kab/Kota		2	-		-	-
15.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		2	-	1	-	-
16.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis	Peserta		50	100	30	-	-

RENJA 2023

	Bencana)	Bencana) Lintas Kabupaten/Kota							
i.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab/Kota				100	-	-
17.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	Dokumen		1	1	100	4	-
18.	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab/org		/50			115	
19.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	unit		3			1	
20.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab/Lokasi/Org		4 Kab/14 Lokasi/40 orang			15 Lokasi	
21.	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Kabupaten yang tertangani Pasca Bencana di Daerah	Kab		2			2	
22.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan	Laporan		1			4 Kab/Kota	

RENJA 2023

		Penanganan Awal Darurat Bencana							
j.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota						
23.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kali	28	1	100	13 Kab/Kota	-	-
24.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	org	45	1	100	1 lap	-	-
25.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paket	4		100	1 lap	-	-
k.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana	Persentase Pendampingan Pasca Bencana	Kab/Kota					-	-
26.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Pokmas	3		100	1 laporan	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								

RENJA 2023

	Kabupaten									
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 2 (Dua) Program pada Renja Tahun 2023, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah.

Olehnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tiga fungsi yaitu ; 1) Koordinasi pada saat pra bencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan; 2) Komando pada saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik; 3) serta Pelaksanaan yang meliputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Bencana / Kesiapsiagaan dan Pencegahan

- a) Mendayagunakan dan mengaktifkan posko Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, atau BPBD bagi daerah yang sudah membentuk, beserta perlengkapan penduduk seperti ; Peta Lokasi Bencana, Alat Komunikasi, Tenda Darurat, Genset (alat penerangan), Kendaraan Operasional sesuai dengan kondisi daerah, Dapur Umum berikut perlengkapan logistiknya dan lain-lain.
- b) Melakukan analisis/identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana.
- c) Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana
- d) Melakukan pemberian informasi peringatan dini kepada masyarakat
- e) Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana baik

RENJA 2023

untuk aparat maupun masyarakat.

- f) Melakukan simulasi menghadapi bencana

2. Saat Terjadinya Bencana Tanggap Darurat dan Logistik

- a) Menjadi (Incident Commander) dalam mengkoordinasi Penanggulangan Bencana,
- b) Meningkatkan peran posko Penanggulangan Bencana selama 24 jam, dengan membentuk "Posko Aju" dilokasi kejadian bencana,
- c) Menggelar operasi penanggulangan bencana dengan mengerahkan sumber daya yang ada di daerah,
- d) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,
- e) Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan,
- f) Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan,
- g) Penyediaan kebutuhan dasar antara lain air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,
- h) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya,
- i) Pemulihan dengan segera sarana prasarana vital.

3. Sesudah Terjadinya Bencana /Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan kewenangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana kegiatan yang dapat dilakukan pada wilayah tersebut, seperti **Kegiatan Rehabilitasi** :

- a) Koordinasi Rehabilitasi Pasca bencana
- b) Perbaikan Lingkungan Daerah bencana
- c) Perbaikan Prasarana dan Sarana umum
- d) Pemberian Bantuan, Perbaikan rumah masyarakat
- e) Pemulihan Sosial Psikologis
- f) Pelayanan Kesehatan
- g) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
- h) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
- i) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- j) Pemulihan Fungsi Pemerintahan

k) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Kegiatan Rekonstruksi :

- a) Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana.
- b) Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- c) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- d) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- e) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana
- f) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- g) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- h) Peningkatan fungsi pelayanan public dan
- i) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Adapun kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang selama ini pernah dilakukan adalah :

- a) Mendata korban pengungsi dan korban jiwa,
- b) Mendata kerusakan sarana prasarana pemerintah, rumah penduduk, fasilitas umum, sosial dan lain-lain,
- c) Menyediakan / mengganti surat-surat kependudukan yang hilang / rusak seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lain-lain,
- d) Mengantisipasi dampak wabah penyakit,
- e) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,
- f) Menyediakan posko trauma center.

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sulteng

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum

sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan

- 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya:
(1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya: (1) Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (3) belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah dan masyarakat; (4) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berumber dari pemerintah daerah.
- 2. Tanggap Darurat, Logistik dan Peralatan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (2) Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana; (3) Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan; (4) Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah; (5) masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
- 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Belum adanya basisdata yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial; (4) Belum maksimalnya Koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian; (5) Belum terencanakannya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (6) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah. Dari rancangan awal yang telah disusun pada BPBD Propinsi Sulawesi Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja badan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPBD Propinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BPBD Propinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	KET
1	2	3	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis BPBD Prov Sulteng	100%	11,971,869,214	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	600.000.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	200.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA[1]SKP	3 Dok	150.000.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	250.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dukungan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	10,577,762,931	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	7,991,834,93	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	2,078,088,000	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	200.000.000	
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	307,840,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah pada OPD	100%	100.000.000	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	40.000.000	

RENJA 2023

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi OPD	100%	300.000.000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	100.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Administrasi Umum	100%	32.000.150	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Layanan Administrasi Umum	100%	234,106,283	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	150.000.000	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	54,106,283	
	- Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	30.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	70.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	70.000.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tercapainya Penanganan bencana di provinsi Sulawesi Tengah	Kab/Kota	5,356,195,130	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tingkat Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Kab/Kota	200.000.000	
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	100.000.000	

RENJA 2023

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang Bersifat Rutin (Pajak, Sosial/Siskg, PPK, dan Bencana (Per Jenis	Jumlah (KIE) yang Bersifat Rutin (Pajak, Sosial/Siskg, PPK, dan Bencana (Per Jenis	Jumlah (KIE) yang Bersifat Rutin (Pajak, Sosial/Siskg, PPK, dan Bencana (Per Jenis	Jumlah (KIE) yang Bersifat Rutin (Pajak, Sosial/Siskg, PPK, dan Bencana (Per Jenis	Jumlah (KIE) yang Bersifat Rutin (Pajak, Sosial/Siskg, PPK, dan Bencana (Per Jenis
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab/Kota	3.819.944.625	
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	4 Dok	100.000.000	
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	1 Lap	50.000.000	
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Lokasi	1.700.000.000	
- Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Kabupaten yang tertangani Pasca Bencana di Daerah	2 Kab	400.000.000	
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	4 Kab/Kota	200.000.000	
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	115 org/2 kab	100.000.000	
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1 Dok	100.000.000	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	400.000.000	
- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	13 kab/Kota	200.000.000	
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Lap	100.000.000	
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 lap	100.000.000	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pendampingan Pasca Bencana	Kab/Kota	300.000.000	
- Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1	100.000.000	

RENJA 2023

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah		Dokumen	
- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100.000.000
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provins	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Laporan	100.000.000

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program

Yang menjadi Kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya sangat cepat, terkadang menimbulkan konflik lahan yang berakhir dengan konflik sosial, padahal dibalik semua itu ada suatu masalah besar yang timbul yaitu Daerah Rawan Bencana, dari berbagai kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa wilayah mempunyai potensi ancaman bencana yang pada hakekatnya semua jenis bencana tersebut dapat disebabkan oleh alam dan non alam serta bencana karena ulah manusia (sosial). Hal tersebut biasanya mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis bagi masyarakat korban bencana. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) ketika terjadi bencana (saat bencana) dan sesudah terjadi bencana (pascabencana) maupun bencana yang potensial terjadi dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 maka BPBD Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui peningkatan peran koordinasi dan mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara Nasional penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah kebijakan dan strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah disinkronisasikan dengan arah kebijakan dan strategi daerah dibidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana tahun anggaran 2022 adalah:

- 1) Mengurangi resiko bencana
- 2) Memberikan jaminan perlindungan social korban bencana
- 3) Menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu
- 4) Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi.
- 5) Menyiapkan logistik dan peralatan.
- 6) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Prov. Sulteng

Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan, serta indikator (tolok ukur) kinerja

kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyusunan rencana kerja ini

- 1) Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dan tujuannya adalah :

- 1) Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun tujuan Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dalam peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui:

- 1) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha Pengurangan risiko dan mitigasi serta penanganan kedaruratan bencana;
- 2) Membangun sistem informasi penanggulangan bencana di daerah-daerah kabupaten/kota yang rawan bencana;
- 3) Pembentukan wilayah-wilayah penanganan bencana dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai bagi Kabupaten/Kota.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi BPBD Prov. Sulteng, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan didukung kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan didukung kegiatan yaitu:**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
- VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya,
- VIII. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

IX. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan di dukung kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
4. Penanganan Pascabencana Provinsi
5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

X. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan di dukung kegiatan yaitu:

1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 3 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program Kegiatan (output)	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Rencana Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 . 01.1.03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
05 . 01.1.03.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2 Dokumen	455.090.000	APBD		2 Dokumen	450.000.000
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Palu	2 Dokumen	455.090.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
1.05.01.1.01.04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	1 Laporan	51.300.72	APBD		1 Laporan	152.383.692
05 . 01.1.03.03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
05 .	Penyediaan	Tersedianya	palu	80	7.991.834.891	APBD	82	1	

RENJA 2023

01.1.03.06	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	Tunjangan ASN	Orang			Orang	laporan	8.000.000.000
1.05.01.1.02	02				2.078.088	APBD			2.300.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	1 Dokumen					
1.05.01.1.05	05				221.672.050	APBD			300.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	1 Dokumen					
1.05.01.1.02	02				201.725.600	APBD		3 orang	250.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab/Kota	1 Laporan					
1.05.01.1.06	06								
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.05.01.1.06	06				294.940.075	APBD		2 laporan	350.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	palu	2 laporan					
1.05.01.1.06	06								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01.1.06	06				49.959.000	APBD		1 laporan	18.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Palu	1 laporan					
1.05.01.1.06	06				1.043.931	APBD		1 laporan	10.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Palu	1 laporan					
1.05.01.1.06	06				18.230.000	APBD		1 Paket	18.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	palu	1 paket					
1.05.01.1.07	07				229.731.000	APBD		8 Kab/	230.000.000
	Penyelenggaraan	Terlaksananya	Kab/Kota	8 Kab/					

RENJA 2023

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi SKPD	luar daerah					
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.05.01.1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	3 unit	32.000.150	APBD		1 Laporan 30.000.000
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	palu	1 Laporan	11.771.625	APBD		1 Laporan 20.000.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	1 Paket	10.000.000	APBD		1 laporan 20.000.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik Kantor	Palu	1 laporan	146.220.000	APBD		1 laporan 175.000.000
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya Pemeliharaan	Palu	14 unit	32.950.000	APBD		40 unit 32.000.000

RENJA 2023

	dan Mesin lain	Peralatan dan Mesin Lainnya							
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai OPD	Palu	-	-	APBD		5 Orang	100.000.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								
1.05.03.1.02	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kab. Buol, Banggai, Toli-Toli	1 Dokumen/orang	116.540.150/100	APBD		1 Dokumen/orang	200.000.000
1.05.01.1.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya Kegiatan Kebencanaan Didaerah	Kab. Banggai	30 Orang	273.828.350	APBD		30 Orang	275.000.000,00
1.05.01.1.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								
1.05.03.1.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Kab. Morowali Utara	2 Dokumen	110.068.150	APBD		2 Dokumen	120.000.000
1.05.03.1.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Terlaksananya Pelatihan Manajemen	Kab. Morowali Utara	50 Orang	161.943.500	APBD		50 Orang	170.000.000

RENJA 2023

	Bencana	Dan Analisis Risiko Bencana						
1.05.03.1.02	204 Pemyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Palu	3 Unit	115.014.000,00	APBD	1 Dokumen	434.500.000,00
1.05.03.1.02	206 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Donggala, Parimo, Morowali, Poso	14 Lokasi/Orang	4.516.839.850,00	APBD	1 Dokumen	187.500.000,00
1.05.03.1.02	208 Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Provinsi	Kab. Poso dan Tojo Una-Una	2 Kab	348.865.100,00	APBD	3 Kab /Kota	350.000.000,00
1.05.03.1.02	208 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas TRC Bencana	palu	1 Laporan	1.930.500,00	APBD	1 Laporan	30.000.000,00
1.05.03.1.02	202 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
1.05.03.1.03	302 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terpenuhinya Respon Cepat dalam Penanganan Darurat Bencana	Kab/Kota	1 Laporan	74.000.000,00	APBD	1 Laporan	1.255.500.000,00
1.05.03.1.03	303 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	1 Dokumen	152.582.600,00	APBD	1 Laporan	27.615.000,00
1.05.03.1.03	304 Pemyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab/Kota	132 buah/ lus	735.542.500,00	APBD	1 laporan	62.500.187,50

RENJA 2023

	Bencana	Bencana							
1.05.03.1.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1.05.03.1.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Kab Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		3 Pokmas	139.382.865	APBD			

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pada saat pra bencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan;
- 2) Komando pada saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik;
- 3) serta Pelaksanaan yang meliputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

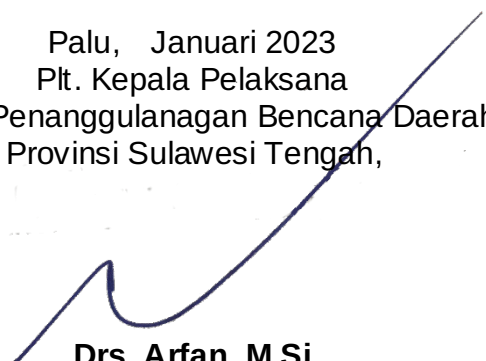
Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Palu, Januari 2023
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Arfan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001